

TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN PUTUSAN VERSTEK DALAM PERKARA KEPAILITAN DI PENGADILAN NIAGA

Parmin

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hukum acara dalam perkara kepailitan di Pengadilan Niaga yang selama ini berlangsung jika dikaitkan dengan ketidakhadiran pihak debitor termohon pailit dalam persidangan. Dan untuk mengetahui masalah dalam putusan Nomor 82/Pailit/2001/PN Niaga Jkt.Pst dan Putusan Nomor 49/Pailit/2001/PN Niaga Jkt. Pst.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perjanjian. Dasar dari perjanjian kredit menurut Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdara adalah asas kebebasan berkontrak, yaitu masing-masing pihak bebas mengadakan perjanjian apapun sebatas tidak melanggar ketertiban umum maupun kepatutan, dan para pihak tunduk dan terikat dengan isi perjanjian tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif, melalui penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum yang diterapkan dalam hal ini Undang-Undang Kepailitan dan serta mengkaitkan dengan peraturan lain yang relevan.

Hasil penelitian ini dirumuskan bahwa meskipun Undang-Undang Kepailitan tidak secara eksplisit mengatur perihal Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga dalam memutus suatu permohonan pernyataan pailit tanpa hadirnya salah satu pihak dalam persidangan (verstek) yang dalam hal ini adalah pihak debitor termohon pailit, namun pada prakteknya selama ini Pengadilan Niaga sudah beberapa kali memeriksa dan memutus perkara kepailitan tanpa hadirnya pihak debitor termohon pailit dalam persidangan. Hal ini sejalan dengan ketentuan lain-lain dalam Undang-Undang Kepailitan 2004, yakni Pasal 299 yang menyatakan bahwa, "Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini maka hukum acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata." Ketidakhadiran pihak debitor termohon pailit tidak berarti bahwa permohonan pernyataan pailit yang diajukan pihak kreditor termohon pailit pasti dikabulkan oleh majelis hakim. Untuk pemeriksaan perkara, majelis hakim tetap akan menerapkan asas pembuktian sederhana berdasarkan Pasal 2 ayat (1) j.o. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan 2004. Ketidakhadiran pihak debitor termohon pailit dalam persidangan perkara permohonan pernyataan pailit juga tidak secara otomatis diartikan bahwa pihak debitor termohon pailit tidak mampu membayar utangnya atau mengakui apa yang didalilkan oleh pihak kreditor pemohon pailit dalam permohonan pernyataan pailit yang diajukannya.

Saran yang disampaikan adalah Sebaiknya Undang-Undang Kepailitan mengatur secara tegas mengenai hukum acara pemeriksaan perkara kepailitan yang terkait erat dengan ketidakhadiran pihak debitor termohon pailit di persidangan, sehingga bagi majelis hakim tidak ada lagi keragu-raguan untuk memutus suatu perkara kepailitan secara verstek.

Kata Kunci : putusan verstek

REVIEW OF THE IMPLEMENTATION OF THE DECISIONS Verstek IN BANKRUPTCY CASE IN COURT OF COMMERCE

Parmin

Abstract

This study was conducted to determine the procedural law in the case of bankruptcy in the Commercial Court which have occurred if it is associated with the absence of the defendant bankrupt debtors in the trial. And to identify problems in decision No. 82 / Bankrupt / 2001 / PN Commerce Jkt.Pst and Decision No. 49 / Bankrupt / 2001 / PN Commerce Jkt. Pst. The theory used in this research is the theory of agreement. The basis of the loan agreement pursuant to Article 1320 and 1338 of the Civil Code is the principle of freedom of contract, ie each party free to enter into any agreement to the extent not violate public order and decency, and the parties are subject to and bound by the treaty. The method used is the juridical-normative, through a study of the level of synchronization of the laws applied in this case the Bankruptcy Act and as well as linking with other relevant regulations. Results of this study was formulated that although the Bankruptcy Act does not explicitly set about the judges at the Commercial Court in deciding an application for a declaration of bankruptcy without the presence of one of the parties in the hearing (verstek) which in this case is the debtor defendant bankrupt, but in practice during the Commercial Court has several times to examine and decide the case without the presence of bankruptcy debtors bankrupt defendant in the trial. This is in line with the provisions of Iain forth in the Bankruptcy Act, 2004, namely Article 299 which states that, "Except as otherwise provided in this Act, the law applicable is the Civil Procedure Code." Absence debtors insolvent defendant does not mean that the application for a declaration of bankruptcy filed for bankruptcy the creditors defendant is granted by the judge. For the examination of the case, the judge will apply the burden of proof remains modest by Article 2 (1) j.o. Article 8 paragraph (4) Bankruptcy Act of 2004. The absence of the debtor bankrupt defendant in the trial court declaration of bankruptcy petition does not automatically mean that the defendant bankrupt debtor is unable to pay its debts or acknowledge what is argued by the applicant creditor in the bankruptcy petition statement bankruptcy filing. Preferably suggestions submitted is the Bankruptcy Act expressly regulate the procedural law of the bankruptcy case investigation is closely linked to the absence of the defendant bankrupt debtors in court, so the judge no more hesitations to decide a case in verstek bankruptcy.

Keywords: decision verstek